

**UPAYA KETERLIBATAN INDONESIA DALAM  
MENGINTERNASIONALISASIKAN KONSEP *BLUE  
ECONOMY*  
STUDI KASUS: KEPEMIMPINAN INDONESIA DALAM IORA  
PERIODE 2015-2017**

**Agung Y. Nugroho, Ktisas Revafiani Dandel Sampe**

*Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta*

[aijn\\_agung@yahoo.com](mailto:aijn_agung@yahoo.com), [ktisasrefavianny@gmail.com](mailto:ktisasrefavianny@gmail.com)

**ABSTRAK**

Tulisan ini membahas upaya keterlibatan Indonesia untuk menginternasionalisasikan konsep *blue economy* dengan mengambil studi kasus pada kepemimpinan Indonesia di IORA periode 2015-2017. Kepemimpinan Indonesia memprakarsai KTT IORA 2017 dan menghasilkan dokumen penting *IORA Concord*, *IORA Action Plan* dan Deklarasi Jakarta tentang Ekonomi Biru. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber-sumber yang diperoleh secara dokumenter, studi kepustakaan, dan penelusuran data online untuk memperkuat argumentasi penulis. *Blue Economy* merupakan konsep yang dikembangkan oleh Gunter Pauli yang memadukan unsur ekonomi dan lingkungan. Agenda Indonesia untuk mengedepankan konsep ini untuk meningkatkan ekonominya, mengukuhkan kepentingan politisnya dan memperkuat pengaruhnya di Samudra Hindia, dan menyelamatkan lingkungan. Penelitian menggunakan teori rezim internasional untuk melihat perkembangan *blue economy* sebagai aturan dan norma yang menjadi pengikat Indonesia dengan IORA dan teori *norm life cycles* yang membahas tentang siklus hidup norma *blue economy* yang menjelaskan tentang kaitan Indonesia dengan kemunculan *blue economy* mulai periode Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sampai Presiden Joko Widodo, kepemimpinan Indonesia dalam mempersuasi dan mensosialisasikan *blue economy* dan internalisasi *blue economy* dalam ruang lingkup IORA. Penelitian ini juga membahas output yang didapatkan setelah Indonesia bertindak sebagai *blue economy norm entrepreneur* yaitu mendapatkan pengakuan internasional tentang kemampuan Indonesia, hal ini sejalan dengan usaha Indonesia yang berusaha untuk mewujudkan Poros Maritim Dunia.

**Kata Kunci : *Blue Economy*, IORA, *Norm entrepreneur*, *Norm Life Cycles*, Rezim Internasional.**

**ABSTRACT**

*This paper discusses the efforts of Indonesia involvement to internationalize the concept of blue economy by taking a case study on Indonesian leadership at IORA for the 2015-2017 period. The leadership of Indonesian initiated the 2017 IORA Summit and produced*

*important IORA Concord documents, the IORA Action Plan and the Jakarta Declaration on the Blue Economy. This paper used qualitative methods with documentary sources, library research, and online data search to strengthen the argument of writer. Blue Economy is a concept developed by Gunter Pauli that combines economic and environmental elements. The agenda of Indonesia is to advance this concept to improve its economy, strengthen its political interests and strengthen its influence in the Indian Ocean, and save the environment. The research used international regime theory to see the development of the blue economy as rules and norms that bind Indonesia with IORA and the norm life cycles theory that discusses the life cycle of the blue economy norm which explains about relationship of Indonesia with the emergence of the blue economy from the period of President Susilo Bambang Yudhoyono to the President Joko Widodo, the leadership of Indonesia in persuading and socializing the blue economy and internalizing the blue economy within the scope of the IORA. This research also discussed the output obtained after Indonesia acts as a blue economy norm entrepreneur, namely gaining international recognition about ability of Indonesia, this is in line with efforts of Indonesia to realize the World Maritime Axis.*

**Keywords:** *Blue Economy, IORA, Norm entrepreneur, Norm Life Cycles, International Regime.*

## **PENDAHULUAN**

Indonesia memiliki wilayah lautan yang mencapai 2/3 dari seluruh wilayah Indonesia yang seluas 6,32 juta kilometer persegi (km<sup>2</sup>), memiliki 17.504 pulau, dan memiliki garis terpanjang kedua di dunia setelah Kanada yaitu 99.093 km<sup>2</sup> (KKP, 2018). Dengan luas wilayah dan kekayaan laut di dalamnya, Indonesia memiliki potensi ekonomi yang besar. Sektor ekonomi kelautan ini dapat membawa keuntungan yang besar kepada Indonesia jika dimanfaatkan dengan maksimal. Alasannya adalah karena dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan dapat menyentuh angka USD 82 miliar per tahun (Setkab, 2019). Dengan modal potensi kelautan tersebut, Indonesia memandang laut dapat menjadi tumpuan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan (Indonesia, 2012). Pembangunan dan pemanfaatan kelautan ini disesuaikan dengan konsep *Sustainable Development Goals* Tujuan 14 : Menjaga ekosistem laut yang juga menopang potensi Indonesia sebagai negara maritim dunia.

Dengan menyadari potensi kelautan Indonesia, Presiden terpilih yaitu Presiden Jokowi bercita-cita untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim

Dunia. Hal ini diwujudkan ketika beliau menghadiri KTT ke-9 *East Asia Summit* pada tanggal 13 November 2014 di Nay Pyi Taw, Myanmar (Tempo, 2019). Dalam usaha untuk mencapai Poros Maritim Dunia, Indonesia telah merancang pilar-pilar yang mendukung terwujudnya visi ini. Salah satunya adalah membahas tentang diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja di bidang kelautan. Diplomasi maritim diwujudkan dengan melakukan perundingan-perundingan dengan mitra kerja Indonesia terutama negara-negara kelautan yang untuk menjamin kepentingan nasional Indonesia. Diplomasi maritim ini juga memberikan peluang untuk Indonesia dalam mengusulkan atau merekomendasi/prakarsa dalam berbagai isu kemaritiman seperti kerja sama jalur transportasi perdagangan laut, wilayah perbatasan kelautan, dan ekonomi kelautan yang berkelanjutan. Indonesia berusaha untuk konsisten dalam menjalankan diplomasi maritimnya yaitu dengan meningkatkan kerja sama negara-negara di pesisir Samudra Hindia dengan melibatkan diri dalam IORA (*Indian Ocean Rim Association*).

IORA merupakan organisasi regional yang ada di Samudra Hindia yang berdiri secara resmi pada 6-7 Maret 1997 (IORA, 2019). Indonesia mendapatkan kesempatan untuk menjadi Ketua IORA dalam periode 2015-2017. Sebagai wujud diplomasi maritimnya, Indonesia berhasil mendorong negara-negara anggota IORA untuk menghasilkan dan menyempurnakan norma-norma internasional yang disepakati bersama lewat *Jakarta Concord*. Tidak hanya itu, Indonesia juga berhasil mengangkat kembali topik tentang *blue economy* kemudian memperdalam konsep ini sehingga mampu meluncurkan Deklarasi IORA terkait *Blue Economy* di dalam ruang lingkup Samudra Hindia (*Declaration of Indian Ocean Rim Association on the Blue Economy in the Indian Ocean Region*) (IORA, Blue Economy, 2019).

*Blue Economy* merupakan gagasan ilmuwan asal Belgia yaitu Gunter A. Pauli. Konsep ini pertama kali dikenalkan dan dikembangkan di Indonesia pada tahun 2012 oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia yaitu Cicip Sutardjo pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) .

Sebelumnya, Presiden SBY telah mempromosikan *Blue Economy* di Konferensi PBB yang membahas *Sustainable Development Rio+ 20*. Dalam konferensi ini yang difokuskan adalah ekonomi hijau. Namun, Negara-negara berkembang di Pasifik mulai mempromosikan ekonomi biru yang berdasar pada lingkungan kelautan. Menurut mereka, ekonomi hijau adalah ekonomi biru yang menonjolkan kelautan, yang menyumbang hampir 71 persen dari permukaan bumi. Seperti ekonomi hijau, ekonomi biru tidak hanya terbatas pada pemanfaatan kelautan namun prinsip-prinsipnya bisa digunakan dalam pengembangan kelautan. Namun, menurut penulis dalam konferensi di Rio, ekonomi hijau dan biru muncul bersamaan, namun ekonomi hijau menjadi fokus yang lebih awal daripada ekonomi biru yang merupakan konsep baru yang ditawarkan oleh Gunter A. Pauli. *Blue Economy* merupakan pendekatan baru dimana aktivitas ekonomi harus inovatif, nir-limbah, membuka banyak lapangan kerja untuk orang miskin, dan efisien dalam menggunakan sumber daya. Dua pilar yang mendasari *Blue Economy* adalah ekonomi dan lingkungan.

Posisi strategis IORA yang memiliki potensi untuk mendatangkan keuntungan bagi Indonesia karena negara-negara di sekitar Samudra Hindia dan populasi 2,7 miliar orang pada kawasan ini yang berpengaruh pada konsumsi pada barang dan jasa. Berdasarkan sata Kementerian Perindustrian (Kemenperin) pada tahun 2016 menyatakan bahwa nilai total perdagangan Indonesia dengan negara-negara IORA sebesar USD 82,57 miliar (Tempo, KTT IORA, Indonesia Incar Kerja Sama Industri Maritim, 2019). Dengan pelaksanaan diplomasi maritim dengan IORA akan meningkatkan keuntungan Indonesia khususnya dalam sektor ekonomi kelautan.

IORA terkenal dengan jalur distribusi minyak dan gas. Namun, IORA berkomitmen untuk melakukan kegiatan kerjasama ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dengan potensi kelautan dan komitmen Indonesia kepada IORA, konsep *Blue Economy* dapat digunakan sebagai strategi Indonesia untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Komitmen Indonesia untuk menjalankan *blue economy* yang dibangun atas kesadaran tentang lingkungan dan kebutuhan untuk

menjadikan kehidupan masyarakat Indonesia yang lebih adil dan sejahtera juga berusaha untuk ditularkan kepada negara-negara anggota IORA.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum IORA**

Secara historis dan geografis, negara-negara yang ada di sekitar Samudra Hindia harus memasukkan Samudra Hindia sebagai fokus mereka karena memiliki manfaat sosial, ekonomi, dan bisa menciptakan perdamaian di regional ini. Sesuai dengan perubahan tata laku internasional, hal ini meminta untuk negara-negara untuk bersikap adaptif tidak terkecuali negara-negara di Laut India sehingga dibutuhkan media yang bisa mengakomodasi kepentingan tiap negara. Oleh karena itu, dibutuhkan perekat antar negara-negara di kawasan ini. Perekat tersebut adalah IORA. Tujuan pembentukan IORA adalah *“to promote sustained growth and balanced development of the region and of the member states, and to create common ground for regional economic co-operation* (IORA, About IORA, 2017).” Dalam artian, IORA memiliki peran untuk mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan pembangunan yang seimbang di kawasan Samudra Hindia, dan untuk menciptakan landasan bersama untuk kerja sama ekonomi pada skala regional.

*Indian Ocean Rim Association* (IORA) adalah organisasi antar pemerintah satu-satunya yang didirikan di Samudra Hindia pada tanggal 7 Maret 1997. Sebelumnya, IORA memiliki nama *Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation* (IOR-ARC) (IORA, About IORA, 2017). Namun untuk meningkatkan kesadaran publik bahwa forum ini adalah pemersatu negara-negara Samudra Hindia sebagai satu kawasan sehingga pergantian nama diperlukan. IORA memiliki 22 negara anggota, 9 *Dialogue Partners* yang terdiri dari Australia, Bangladesh, Komoros, India, Indonesia, Iran, Kenya, Madagascar, Malaysia, Maldives, Mauritius, Mozambik, Oman, Persatuan Emirat Arab, Seychelles, Singapura, Somalia, Sri Lanka, Tanzania, Thailand, dan Yaman

(IORA, About IORA, 2017). Kemudian 9 negara mitra dialog lainnya adalah Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Jerman, Korea Selatan, Mesir, Perancis, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Turki (IORA, Dialogue Partners, 2017). Perlu diketahui bahwa tidak ada organisasi yang mengubungkan negara-negara di Samudra Hindia selain IORA yang keanggotaannya mencakup tiga benua sekaligus yaitu, Asia, Australia, dan Afrika.

Keketuaan IORA menganut konsep kepemimpinan 3 (tiga) negara atau “Troika” (IORA, Troika, 2017). Dalam artian, konsep troika mengatur komposisi kepemimpinan yaitu ketua IORA periode sebelumnya ditambah Ketua IORA yang sedang menjabat dan wakilnya (yang dipersiapkan untuk menjadi Ketua IORA pada periode berikutnya). Dalam kaitan ini, tiga serangkai ini diamanatkan oleh Dewan Menteri untuk secara aktif melakukan pertemuan troika di sela-sela Pertemuan Tingkat Menteri (CoM) dan Pertemuan Tingkat Pejabat Senior (CSO) guna semakin menyukseskan sekaligus meningkatkan koordinasi program kegiatan IORA (Aspasaf, 2014).

### ***Blue Economy sebagai Agenda Indonesia***

Konsep *Blue Economy* menjadi suatu keharusan untuk diaplikasikan di berbagai kawasan karena dinilai konsep ini muncul sebagai pendorong potensial yang signifikan untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, seperti di wilayah Asia Timur yang mengumpulkan 10 menteri dan menandatangani *Changwon Declaration Toward an Ocean-based Blue Economy Moving Ahead with the Sustainable Development Strategy for the Seas of East Asia* pada tahun 2012. Kemudian Asia Pasifik dengan kerja sama APEC yang menghasilkan Deklarasi Xianmen pada pertemuan tingkat kementerian, selanjutnya IORA pada regional Samudra Hindia sejak tahun 2014 telah mengadopsi *blue economy*, dan Uni Eropa yang sudah membuat *frame work* dan mengaplikasikannya dalam *European Parliament*. Sampai dengan tahun 2012 sudah ada 115 negara yang mengadopsi *blue economy* (Attri & Muhller, 2018).

No	Negara atau Kawasan yang mengadopsi Ekonomi Biru	Tahun	Jumlah Negara
1	IORA Ministerial on Blue Economy	2015 dan 2017	21
2	Small Island Developing States (SIDS)	2012	47
3	Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)	2014	21
4	European Commission	2017	27
5	Mediterranean Ministerial	2015	11

**(Tabel 4.1 : Negara-negara yang mengadopsi Blue Economy)**

Negara-negara ini mengadopsi karena menganggap bahwa konsep *blue economy* dapat menjawab kebutuhan ekonomi dan lingkungan yang sudah mendesak sehingga ekonomi biru mendapatkan perhatian khusus dengan menjadi tema diskusi skala internasional yang mendorong penelitian, pembuatan deklarasi, dan pertukaran informasi dalam memahami potensi laut yang bisa dikelola dengan memperhatikan aspek lingkungan. Pemerintah Indonesia pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Rio +20 atau KTT Pembangunan Berkelanjutan di Rio de Janeiro, Brazil pada tanggal 20-22 Juni 2012 membawa misi bahwa Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan. Dalam pidatonya beliau menyebutkan “*For Indonesia, Blue Economy is Our Next Frontier*” yang mengajak dunia melaksanakan ekonomi hijau tetapi juga mengkampanyekan ekonomi biru (Indonesia, Kebijakan Ekonomi Kelautan dengan Model Ekonomi Biru, 2012). Kepentingan Indonesia di IORA pada aspek ekonomi adalah pertama, sebagai promosi kerja sama ekonomi antar anggota yang saling menguntungkan, yang didalamnya mencakup transportasi/ perhubungan dan komunikasi, perdagangan investasi. Kedua, Pemerintah Indonesia mengejar kerja sama dalam upaya pengelolaan sumber daya alam maritim (perikanan, energi dan mineral) dimana Indonesia yang kaya akan sumber daya alam non migas dapat mengambil keuntungan. Ketiga, dengan melakukan kerja sama pada IORA Indonesia ingin untuk meningkatkan nilai ekspor Indonesia, mendorong

para investor asing untuk masuk ke Indonesia, dan meningkatkan jumlah wisatawan asing untuk melakukan aktivitas ke Indonesia (Informasi, 2017). Oleh karena itu, ekonomi biru dapat dijadikan sebagai alat diplomasi Indonesia dalam forum IORA. Berdasarkan analisa kepentingan sebelumnya, keinginan Indonesia untuk dapat mengelola dan pengembangan potensi manusia penting diimplementasikan pada Samudra Hindia melalui IORA untuk memaksimalkan kepentingan ekonomi.

Konsep *Sustainable Development Goals* memiliki 17 target yang harus dicapai. Salah satunya adalah Tujuan 14 yaitu Menjaga Ekosistem Laut yang memiliki maksud untuk mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra, dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan (Infid, 2016). Sebagai bentuk tanggung jawab Indonesia terhadap kepentingan global, Pemerintah Indonesia juga menyeleraskan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDG) dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2005-2025) sampai dengan era Presiden Joko Widodo. Dalam BAB IV.1.7 Lampiran UU 17/2007 menyebutkan bahwa pembangunan jangka panjang 2005-2025 adalah mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional. Kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintahan selanjutnya yaitu Presiden Jokowi yang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) (2015-2019) untuk berkontribusi dalam mengatur perdagangan dan pembangunan yang berkelanjutan.

### **Indonesia sebagai *Blue Economy Norm Entrepreneur***

Indonesia menjalankan estafet kepemimpinan di IORA (2015-2017). Berdasarkan konsep kepemimpinan Troika yang dianut IORA, Indonesia menjadi Ketua IORA (2015-2017) yang sebelumnya pada era keketuaan Australia di IORA, Indonesia merupakan wakil ketua. Pertemuan *15<sup>th</sup> IORA Council of Ministerial Meeting* di Padang, Sumatera Barat menandai penyerahan kepemimpinan IORA dari Australia menjadi Indonesia untuk periode 2015-2017.

Pada saat Indonesia menjadi Ketua IORA, era pemerintahan yang berlangsung telah dilanjutkan oleh Presiden Joko Widodo. Dengan tampuk kepemimpinan yang dipegang, Indonesia memanfaatkan posisi strategisnya untuk menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang dilaksanakan tanggal 5-7 Maret 2017 yang mengangkat tema “*Strengthening Maritime Cooperation for Peaceful, Stable, and Prosperous Indian Ocean*” (Memperkuat Kerja Sama Maritim untuk Kawasan Samudra Hindia yang Damai, Stabil, dan Makmur) (Kumparan, 2019). Kepemimpinan Indonesia telah mendorong pelaksanaan KTT, *IORA Action Plan 2017-2021* atau Rencana Kerja IORA, dan Deklarasi Ekonomi Biru di Jakarta.

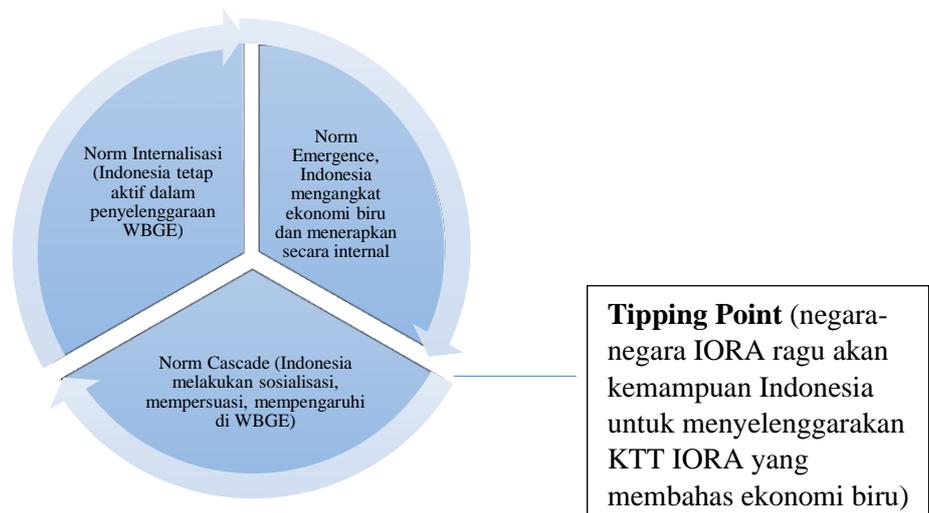
Kepemimpinan Indonesia di IORA telah turut serta untuk meningkatkan konsep *blue economy* sebagai suatu prinsip, norma, prosedur pembuatan keputusan dimana kumpulan ekspektasi dari para aktornya bertemu pada area tertentu dalam hubungan internasional yang disebut rezim. Seperti yang dikemukakan oleh Krasner (1982), rezim memiliki empat komponen yaitu prinsip, norma, peraturan, dan prosedur pembuatan keputusan. Prinsip merupakan pegangan awal aktor tersebut dalam berperilaku. Norma merupakan langkah selanjutnya setelah prinsip telah melekat. Maka dari itu, prinsip dan norma tidak dapat diubah dan dipisahkan. Sedangkan, komponen ketiga, yaitu peraturan sangat mudah untuk berubah. Komponen keempat, yaitu prosedur pembuatan keputusan membutuhkan pendapat dari banyak pihak yang semakin menambah sifat subyektivitasnya. Hal-hal tersebut juga mempengaruhi obyek lain seperti perilaku para aktor sehingga berdampak besar pada hasil. Maksud hasil ini adalah aturan baru yang dikeluarkan untuk menyikapi isu terbaru (Hennida, 2015).

Dalam *teori norm life cycles* ada tiga tahap yaitu *norm emergence*, *norm cascading*, dan *internalization*. Dasar Pemerintah Indonesia untuk bertindak sebagai *norm entrepreneurs* adalah bahwa Pemerintah Indonesia ingin terlibat dalam percaturan internasional tentang lingkungan. Deputi Koordinasi Bidang Kedaulatan Maritim Kemenko Maritim Arif Havas Oegroseno menyebutkan bahwa konsep ekonomi biru bisa menjadi pilihan utama bagi semua negara di

dunia, karena menawarkan konsep berkelanjutan dalam pelaksanaannya (Mongabay, 2017). Beliau menyebutkan kepentingan untuk menunjukkan komitmen dan menggalang dukungan global dalam memanfaatkan potensi kelautan dengan pendekatan keberlanjutan sebagai inti dari konsep ekonomi biru. Kemudian, untuk *norm cascading*, kepemimpinan Indonesia di IORA telah berperan aktif dan menghasilkan *Blue Economy Working Group*. perkembangan Ekonomi Biru di IORA akan meningkat dengan dibentuknya *Blue Economy Working Group (WBGE)*. WBGE terbentuk berasal dari *IORA Action Plan 2017-2021* yang diadopsi pada 5-7 Maret 2017 di Jakarta, Indonesia. Ada 6 prioritas dalam pelaksanaan *blue economy* yang diusung ketika pertemuan para menteri (Council of Ministers Meeting (COMM)) yang direvisi oleh Sekretariat IORA dan negara-negara anggota : (a) Perikanan dan Akuakultur; (b) Energi Laut Tebarukan; (c) Pelabuhan dan pengiriman; (d) *Offshore Hydrocarbons and Seabed Minerals*; (e) Bioteknologi Kelautan, Pengembangan dan Penelitian; (f) Pariwisata. (IORA, Blue Economy, 2019). Selain itu, Indonesia juga memberikan usul penting untuk memudahkan implementasi ekonomi biru yaitu dengan melakukan *Voluntary Commitment* atau komitmen kesukarelaan yang menjadi salah satu capaian penting dari Pertemuan Tingkat Pejabat Tinggi (SOM) yang merupakan rangkaian dari the 2<sup>nd</sup> *IORA Blue Economy Conference*. Beliau menyebutkan “Komitmen ini merupakan usulan Indonesia untuk meminta kesediaan dari negara-negara anggota IORA yang mampu untuk memberikan bantuan kepada negara-negara anggota IORA lain di bidang apa saja (Kemenkomaritiman, 2019)”. Dengan ini, Indonesia yang merupakan anggota IORA dan IORA sebagai institusi berusaha untuk menunjukkan komitmennya dengan membahas dan menjadikan hal-hal yang terkait dengan ekonomi biru dengan spesifik untuk menjadi fokus IORA sebagai institusi dan mendorong anggotanya untuk menjalankan konsep ini di negaranya masing-masing. Untuk mencapai internalisasi proses yang ditempuh tidak dapat pada waktu yang instan sehingga *blue economy* adalah *Blue Economy Working Group (WBGE)* harus dimaksimalkan.

Dasar pembentukan WBGE berasal dari *IORA Action Plan 2017-2021*. Penambahan kelompok kerja pada sektor *blue economy* ini ada pada era kepemimpinan Indonesia sebagai Ketua IORA . Penambahan *working group* ini merupakan wujud keseriusan dari norma yang telah terfasilitasi yang menghendaki bahwa *working group* tidak memenuhi kepentingan jangka pendek saja melainkan mendorong *blue economy* dapat bekerja sesuai dengan rencana aksi sampai pada tahun 2021. Sehingga *working group* memberikan masukan dan evaluasi untuk kemajuan *blue economy* di IORA. Dalam forum khusus yang dibentuk ini mungkin hanya pejabat setingkat menteri yang dilibatkan, namun Indonesia lewat Kemenkomaritim sudah melakukan dialog tentang *Financing Blue Economy* bersama dengan swasta, civitas akademika dan *stakeholders*. Keberagaman pihak yang terlibat dalam forum khusus atau kelompok kerja yang dibuat ini sesuai dengan yang dikehendaki oleh Krasner untuk meningkatkan sisi positif dari *blue economy*.

**Gambar 1.1 Peranan Indonesia untuk menginternalisasikan ekonomi biru dengan *Norm Life Cycles***



Dalam siklus hidup ekonomi biru sebagai norma yang digambarkan di atas, penulis berusaha memposisikan Indonesia yang menegaskan dan memperdalam ekonomi biru sebagai norma yang disepakati oleh negara-negara di IORA. Pada tahap ini, ekonomi biru sudah dilakukan di Indonesia mulai era

Presiden SBY hingga Presiden Jokowi. Pemerintah Indonesia juga berhasil melewati titik kritis untuk meyakinkan negara-negara bahwa Indonesia mampu untuk menyelenggarakan KTT IORA I yang di dalamnya juga menyepakati isu lintas sektoral yaitu ekonomi biru. Sebelum sampai pada tahap *cascading*, Indonesia sudah berperan secara aktif untuk mensosialisasikan ekonomi biru dengan *Blue Economy Working Group*. Pada tahap terakhir yaitu internalisasi yang merupakan tahapan panjang untuk kepemimpinan selanjutnya yang dilanjutkan oleh Afrika Selatan.

Penyelenggaraan *Blue Economy Conference* diharapkan dapat memperkuat diplomasi Indonesia di Samudra Hindia. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Arif Havas yang menyebutkan bahwa harapan terbesar Indonesia adalah untuk memperkuat diplomasi Indonesia di negara-negara kawasan Samudra Hindia “Samudra Hindia membentang dari Afrika, Asia, hingga Eropa, potensi perekonomiannya besar, namun belum ada organisasi yang mampu mengelola potensi ini dengan cukup baik,” (Sindonews, 2019). Keputusan Indonesia untuk melibatkan diri dalam IORA sudah tepat karena berusaha untuk mendapatkan dan menyeimbangkan pengaruhnya dalam lingkup negara-negara di Samudra Hindia khususnya mempromosikan dan memperdalam ekonomi biru.

Tantangan bagi kepemimpinan IORA selanjutnya adalah memelihara dan menegakkan IORA Concord dan IORA Action Plan supaya tetap berlangsung karena untuk menghasilkan bukti konkret dari kerja sama ekonomi biru membutuhkan waktu yang lama karena jumlah anggota IORA yang besar dengan bentuk pemerintahan politik dan tingkat pembangunan ekonomi yang beragam. Dengan keberagaman anggota negara IORA yang merupakan negara berkembang dan sebagian kecil negara maju merefleksikan kekuatan politik, keamanan, dan ekonomi yang dimiliki negara-negara anggota IORA dalam menjalankan rencana aksinya sehingga meminimalisir kemungkinan IORA hanya menjadi ajang pertemuan saja bisa terulang. Oleh karena itu, dalam prosedur pembuatan keputusan membutuhkan pendapat dari banyak pihak yang semakin menambah sifat subyektifitas dari blue economy.

Tantangan selanjutnya yang terjadi hampir di pelaksanaan rezim internasional adalah ketika menghasilkan sebuah keputusan ada negara yang belum optimal untuk menjalankannya atau tidak menjalankan keputusan tersebut sama sekali. Apalagi dengan keputusan negara-negara anggota IORA ini tidak terikat (*non-legally binding*) sehingga kemungkinan untuk tidak dilakukan atau dilanjutkan juga ada sehingga penting untuk untuk kelompok kerja untuk mengembangkan pilot projects atau master plan untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan proyek yang terukur dan nyata yang disesuaikan dengan kemampuan negara-negara anggota. Ini dilakukan untuk tetap mempromosikan ekonomi biru sebagai driver dari pengembangan ekonomi-sosial.

### **KESIMPULAN**

Dalam kepemimpinan Indonesia, ada 3 dokumen yang berpengaruh terhadap pelaksanaan norma *blue economy* dan meletakkan dasar untuk terhadap konsep ini yaitu *IORA Concord*, *IORA Action Plan*, dan *Jakarta Declaration on Blue Economy*. Pemerintah Indonesia lewat *Blue Economy Ministerial Conference* berhasil mendorong pembentukan *working group* atau kelompok kerja yang khusus membahas tentang *international promotion or assistance* (promosi atau bantuan internasional), *international information exchange* (pertukaran informasi internasional), *international policy coordination* (koordinasi kebijakan internasional), dan *international monitoring* (pengawasan internasional). IORA didorong dapat menyuarakan kepentingan setiap negara anggota terkait *blue economy*.

Dalam siklus hidup norma *blue economy*, Indonesia sebagai *norm entrepreneur* sudah melewati dua tahap yaitu tahap memunculkan, mempromosikan, dan mendingkai isu *blue economy* di kawasan Samudra Hindia (*Norm Emergence*) dan tahap mensosialisasikan *blue economy* sehingga negara anggota menjadi *norm followers*. Kepemimpinan Indonesia juga sudah melewati titik kritis/ *tipping point* karena mampu meyakinkan negara-negara untuk mengikuti norma ini. Pada tahap terakhir, yaitu *internalization* Pemerintah Indonesia sudah berhasil untuk meninggalkan *footprint* sehingga keketuaan IORA

selanjutnya dapat meneruskan tugas Indonesia untuk tetap menginternalisasikan ekonomi biru. Proses internalisasi norma ekonomi biru merupakan waktu yang panjang sehingga negara-negara harus tetap menjalankan komitmen untuk tetap menjalankan ekonomi biru sampai dengan target-target pada IORA *Action Plan* dapat terwujud.

Diplomasi Indonesia pada IORA merupakan perwujudan Indonesia menerapkan Poros Maritim Dunia. Indonesia harus mampu berjaya di Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia melihat bahwa ada peluang secara ekonomi dan lingkungan yang bisa tercapai jika mampu menjadi negara penyeimbang di Samudra Hindia sehingga Indonesia mulai memperhatikan posisinya di IORA dan menjadi inisiator dari pelaksanaan KTT IORA sampai meluncurkan Deklarasi Ekonomi biru di Jakarta.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aspasaf, P. (2014). *Indonesia dan Indian Ocean Rim Association (IORA) Tahun 2015-2017 : Peluang dan Tantangan*. Jakarta: Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) .
- Attri, N., & Muhller, B. (2018). *The Blue Economy Handbook of the Indian Ocean Region* . Pretoria: Africa Institute of South Africa.
- Bakry, U. S. (2016). *Metode Penelitian Hubungan Internasional* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bappenas. (2017, Agustus 16). *RPJMN 2015-2019*. Retrieved from Bappenas: <https://docplayer.info/413254-Rencana-pembangunan-jangka-menengah-nasional-2015-2019.html>
- Hennida, C. (2015). *Rezim & Organisasi Internasional : interaksi negara, kedaulatan, dan institusi multilateral*. Malang: Intrans Publishing.
- Indonesia, D. K. (2012). *Kebijakan Ekonomi Kelautan dengan Model Ekonomi Biru*. Indonesia: Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia.
- Infid. (2016). *Tujuan 14*. Retrieved from sdg2030indonesia: <https://www.sdg2030indonesia.org/page/22-tujuan-empatbelas>
- Informasi, B. P. (2017, Mei 6). *Peran Strategis RI Di Bidang Kemaritiman Dalam IORA*. Retrieved from Kemenkomaritim: <https://maritim.go.id/peran-strategis-ri-di-bidang-kemaritiman-dalam-iora/>

- IORA. (2017). *About IORA*. Retrieved from IORA: <https://www.iora.int/en/about/about-iora>
- IORA. (2017). *Dialogue Partners*. Retrieved from IORA: <https://www.iora.int/en/about/dialogue-partners>
- IORA. (2017). *Troika*. Retrieved from IORA: <https://www.iora.int/en/structures-mechanisms/structures/troika>
- IORA. (2019, April 11). *About IORA*. Retrieved from IORA: <https://www.iora.int/en/about/about-iora>
- IORA. (2019, Juli 8). *Blue Economy*. Retrieved from IORA: <https://www.iora.int/en/priorities-focus-areas/blue-economy>
- KBBI. (2019, Maret 15). Retrieved from Eksplorasi: <https://kbbi.web.id/eksplorasi>
- Kemenkomaritim, B. P. (2019, Maret 16). *Sidang Tingkat Menteri IORA Adopsi Deklarasi Jakarta Untuk Ekonomi Biru*. Retrieved from Maritim: <https://maritim.go.id/sidang-tingkat-menteri-iora-adopsi-deklarasi-jakarta-untuk-ekonomi-biru/>
- KKP. (2018). *Laut Masa Depan Bangsa*. Indonesia: Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
- Kumparan. (2019, Juli 12). *Menlu Retno Pimpin IORA Summit 2017*. Retrieved from Kumparan : <https://kumparan.com/@kumparannews/menlu-retno-pimpin-iora-summit-2017>
- Mongabay. (2017, April 10). *Apa Manfaat Ekonomi Biru untuk Sektor Kelautan dan Perikanan?*
- Setkab, H. (2019, Juni 5). *Potensi Besar Perikanan Tangkap Air*. Retrieved from Setkab.
- Stake, R. (1995). *The Art of Case Study Research*. California: SAGE.
- Tempo. (2019, Mei 13). *Jokowi Yakin Indonesia Jadi Poros Maritim Dunia*. Retrieved from Tempo: <https://dunia.tempo.co/read/621693/jokowi-yakin-indonesia-jadi-poros-maritim-dunia>
- Tempo. (2019, Maret 12). *KTT IORA, Indonesia Incar Kerja Sama Industri Maritim*. Retrieved from Tempo: <https://bisnis.tempo.co/read/853350/ktt-iora-indonesia-incar-kerja-sama-industri-maritim/full&view=ok>